

EPISTEMOLOGI IMAMAH DALAM TAFSIR AL-QUMMI DAN TAFSIR SUNNI: KAJIAN HERMENEUTIK ATAS QS. AN-NISA': 59

Anita Luthfiana Harahap¹, Haddad Alwi², Akmal Rizki Gunawan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

luthfianaharahap@gmail.com¹, haddad0441253005@uinsu.ac.id²,

akmalgunawangulen@gmail.com³

Abstract

Qur'an Surah an-Nisa' verse 59 is a pivotal text in Islamic discourse on leadership and religious authority, interpreted differently within Shi'i Imami and Sunni traditions. These differences are particularly evident in the interpretation of the phrase uli al-amr and the construction of epistemic authority. This article aims to examine the epistemology of Imamate in Tafsir al-Qummi and to compare it with Ibn Kathir's interpretation of QS. an-Nisa': 59. This study employs a qualitative methodology using a dialogical hermeneutic approach combined with historical analysis to explore the epistemological foundations and contextual backgrounds of both exegetical traditions. The findings reveal that Tafsir al-Qummi positions the Imamate as a continuous epistemological authority embodied in the Imams of Ahl al-Bayt, whose narrations function as normative sources of religious knowledge. In contrast, Ibn Kathir's tafsir conceptualizes uli al-amr as holders of functional authority in religious and political spheres, grounded in an epistemology that prioritizes the authority of the Companions, historical context, and ijtihad. This study concludes that the divergent interpretations of QS. an-Nisa': 59 stem from fundamentally different epistemological frameworks shaped by distinct constructions of religious authority and historical contexts.

Keywords: : Epistemology Of Imamate, Tafsir Al-Qummi, Tafsir Ibn Kathir, QS. An-Nisa': 59, Hermeneutics.

Abstrak

QS. an-Nisa' ayat 59 merupakan salah satu ayat kunci dalam diskursus kepemimpinan dan otoritas keagamaan dalam Islam yang dipahami secara berbeda dalam tradisi Syiah Imamiyah dan Sunni. Perbedaan tersebut terutama tampak dalam penafsiran frasa uli al-amr dan konstruksi sumber otoritas keagamaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis epistemologi Imamah dalam Tafsir al-Qummi serta membandingkannya dengan penafsiran QS. an-Nisa': 59 dalam Tafsir Ibnu Katsir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik dialogis dan analisis historis untuk menelusuri dasar epistemologis dan konteks penafsiran kedua mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir al-Qummi menempatkan Imamah sebagai otoritas epistemologis yang berkelanjutan melalui para Imam Ahlul Bait, di mana riwayat para Imam berfungsi sebagai sumber normatif utama pengetahuan agama. Sebaliknya, Tafsir Ibnu Katsir memandang uli al-amr sebagai otoritas fungsional dalam ranah agama dan politik, dengan epistemologi yang menekankan riwayat sahabat, konteks

historis, dan mekanisme ijtihad. Studi ini menyimpulkan bahwa perbedaan penafsiran QS. an-Nisa': 59 berakar pada perbedaan epistemologi tafsir dan konstruksi otoritas keagamaan yang dibentuk oleh konteks historis masing-masing tradisi.

Kata Kunci: Epistemologi Imamah, Tafsir Al-Qummi, Tafsir Ibnu Katsir, QS. An-Nisa': 59, Hermeneutika.

A. PENDAHULUAN

Ayat 59 Surah an-Nisa' adalah salah satu ayat paling penting dalam percakapan tentang kepemimpinan dan otoritas keagamaan Islam, terutama yang berkaitan dengan konsep ketaatan kepada Allah, Rasul, dan uli al-amr. Ayat ini juga menimbulkan perbedaan besar dalam penafsiran antara tradisi Sunni dan Syiah Imamiyah, terutama mengenai definisi dan sumber uli al-amr (Fadel, 2020).

Konsep Imamah dianggap sebagai prinsip agama (ushul al-din) dalam mazhab Syiah, sejajar dengan kenabian (nubuwwah) dan tauhid, dan merupakan salah satu fondasi teologis paling penting. Dalam kerangka Syiah, Imamah adalah kepemimpinan politik umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, serta otoritas spiritual, religius, dan epistemologis yang dianggap bersifat ilahiah. Para imam diposisikan sebagai penerus Nabi dengan kemampuan ma'sum, tafsir, dan tanggung jawab untuk menjaga ajaran Islam murni agar tidak terdistorsi oleh kepentingan politik dan konflik historis yang terjadi di seluruh masyarakat. Pemahaman ini berbeda secara mendasar dengan keyakinan Sunni, yang memandang kepemimpinan umat sebagai urusan musyawarah dan keputusan komunitas daripada penetapan Tuhan secara langsung (Chandra et al., 2021).

Salah satu perbedaan paling mendasar tentang Imamah adalah bagaimana kedua tradisi memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Menurut tafsir Syiah, beberapa ayat dalam al-Qur'an, seperti ayat 59 surah al-Nisa', yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, didefinisikan sebagai para Imam dari keturunan Nabi SAW yang ditetapkan melalui nash ilahi (Ibrahim, 1984) sementara penafsiran Sunni lebih menekankan arti ulil amri sebagai ulama, pemimpin, dan penguasa umat Islam secara keseluruhan (Kathir, 2000). Dengan perbedaan epistemologis ini, ayat tersebut digunakan sebagai dasar argumen kedua belah pihak dalam menentukan otoritas keagamaan (Syaikhu, 2019).

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat bahwa diskusi tentang Imamah selama ini lebih didominasi kajian historis dan teologis, dan penelaahan epistemologis melalui eksposisi tafsir masih relatif terbatas. Padahal, konstruksi keyakinan Syiah tentang Imamah sangat terkait

dengan cara pengetahuan agama dihasilkan, divalidasi, dan diwariskan melalui otoritas Imam. Untuk menjelaskan bagaimana legitimasi Imamah dibangun berdasarkan otoritas nash, bukan sekadar perdebatan politik atau historis, penting untuk menganalisis penafsiran QS. al-Nisa' ayat 59 dalam Tafsir al-Qummi (Al-Qummi, 1984).

Dalam bidang teologi dan pemikiran Islam, penelitian tentang konsep Imamah dalam tradisi Syiah telah mendapat perhatian yang cukup luas. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya membantu menjelaskan dasar teoretis dan historis Imamah, masih ada ruang penelitian yang belum banyak dieksplorasi, terutama dalam hal aspek epistemologis melalui studi tafsir. Misalnya, penelitian Zulkarnain tentang "Konsep Imamah dalam Perspektif Syiah" membahas bagaimana doktrin Imamah disusun berdasarkan literatur teologi Syiah. Penelitian juga menekankan sifat ilahiah yang mendasari penetapan kepemimpinan Imam (Zulkarnain, 2011). Meskipun penelitian ini menempatkan Imamah sebagai bagian penting dari ushul al-din, ia masih membahas doktrin secara deskriptif-asasi dan belum melihat bagaimana otoritas keilmuan Imam dibentuk dalam tradisi tafsir.

Penelitian lain berjudul Imamah: Kajian Doktrin Syi'ah dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik menyoroti perdebatan intelektual antara Sunni dan Syiah mengenai legitimasi kepemimpinan pasca wafatnya Nabi (Rusli, 2015). Fokus penelitian tersebut berada pada dialektika kalam dan dinamika sejarah, khususnya pada isu suksesi, nash kenabian, dan peran politik dalam pembentukan teologi. Meskipun kaya secara historis dan teologis, penelitian itu belum mengkaji bagaimana otoritas epistemologis Imam dimanifestasikan melalui penafsiran Al-Qur'an, terutama dari karya tafsir primer Syiah.

Disisi lain, penelitian mengenai Pandangan al-Syafi'i terhadap Imamah Syiah menyoroti kritik tokoh Sunni klasik terhadap konsep Imamah dan keberadaan dua belas Imam dalam Syiah. (Kraksaan, 2019). Studi tersebut menguraikan titik-titik penolakan al-Syafi'i terhadap landasan teologis Imamah dan nash kenabian, serta memperlihatkan perbedaan epistemologi antara Sunni dan Syiah dalam memperoleh dan memvalidasi pengetahuan agama. Namun, penelitian ini lebih menempatkan Imamah sebagai objek polemik teologis daripada objek kajian epistemologis berbasis tekstualitas tafsir.

Berdasarkan tiga penelitian tersebut, tampak bahwa diskursus ilmiah mengenai Imamah cenderung didominasi dua arus besar: pertama, kajian teologis-deskriptif mengenai doktrin Imamah; kedua, kajian historis-polemik mengenai perdebatan Sunni-Syiah. Keduanya memiliki kontribusi penting, namun belum menyentuh aspek bagaimana epistemologi Imamah

dibangun melalui tradisi tafsir terutama melalui karya Tafsir al-Qummi, salah satu teks tafsir paling awal dan representatif dalam Syiah Imamiyah. Dengan demikian, terdapat research gap berupa kurangnya kajian yang menelaah legitimasi Imamah bukan hanya dari sisi doktrin atau polemik teologis, tetapi dari konstruksi epistemologi yang ditarik dari penafsiran QS. An-Nisa' ayat 59 oleh al-Qummi dan Ibn Katsir.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan kesenjangan penelitian (research gap) yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam memahami konstruksi epistemologi Imamah melalui analisis penafsiran QS. An-Nisa' ayat 59 dalam Tafsir al-Qummi. Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap bagaimana konsep Imamah tidak hanya diposisikan sebagai institusi kepemimpinan spiritual pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi sebagai struktur epistemologis yang menentukan otoritas kebenaran keagamaan dalam Syiah Imamiyah Itsna 'Asyariyyah. Melalui penelaahan terhadap tafsir al-Qummi, penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana legitimasi dan otoritas para Imam dibangun berdasarkan nash Al-Qur'an serta bagaimana mekanisme transmisi pengetahuan agama dipahami sebagai berasal dari Imam maksum yang bertindak sebagai mediator antara wahyu dan umat.

Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk mengisi kekosongan akademik yang selama ini belum banyak disentuh oleh studi-studi sebelumnya. Jika penelitian terdahulu cenderung membahas Imamah dalam perspektif teologi normatif, sejarah, atau polemik doktrinal antara Sunni dan Syiah, maka penelitian ini berfokus pada aspek episteminya yaitu bagaimana pengetahuan keagamaan dikonstruksi, divalidasi, dan diwariskan melalui otoritas Imam di dalam tradisi tafsir. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara otoritas Imamah dan sistem pengetahuan dalam Syiah, sekaligus memperkaya literatur akademik yang berkaitan dengan studi tafsir dan studi mazhab Islam.

Dengan demikian, keluaran penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi posisi Imam dalam kerangka teologis Syiah, tetapi juga berupaya untuk memperlihatkan bagaimana tafsir al-Qummi menjadikan QS. An-Nisa' ayat 59 sebagai dalil epistemologis yang menentukan cara memahami kebenaran agama. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar perbedaan epistemik antara Syiah dan Sunni, serta membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai relasi antara otoritas penafsiran dan struktur otoritas keagamaan dalam Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam konstruksi makna, epistemologi penafsiran, serta konteks historis yang melatarbelakangi perbedaan tafsir QS. an-Nisa': 59 dalam tradisi Syiah Imamiyah dan Sunni. Data penelitian berupa sumber kepustakaan (library research), yang meliputi Tafsir al-Qummi sebagai representasi tafsir Syiah Imamiyah dan Tafsir Ibnu Katsir sebagai representasi tafsir Sunni, serta literatur pendukung berupa kitab tafsir klasik dan kajian akademik kontemporer yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dialogis, yang dipahami sebagai upaya mendialogkan teks Al-Qur'an, tradisi tafsir, dan horizon pemahaman peneliti. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah penafsiran frasa uli al-amr dengan memperhatikan relasi antara teks, konteks historis, serta latar epistemologis masing-masing mufasir. Melalui hermeneutika dialogis, perbedaan penafsiran tidak dipahami secara polemis, melainkan sebagai hasil dari perjumpaan antara teks dan tradisi penafsiran yang berbeda.

Selain itu, analisis historis digunakan untuk menelusuri konteks sosial, politik, dan intelektual yang memengaruhi lahirnya Tafsir al-Qummi dan Tafsir Ibnu Katsir. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian untuk mengungkap perbedaan epistemologi Imamah dan otoritas keagamaan dalam kedua tradisi tafsir secara komprehensif dan non-konfrontatif.

Melalui langkah-langkah tersebut, penelitian ini berupaya menyusun pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi epistemologi Imamah dalam Tafsir al-Qummi serta implikasinya terhadap pemikiran teologi Syiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nisa' ayat 59 menimbulkan dua konstruksi makna yang berbeda dalam Tafsir al-Qummi dan Tafsir Ibn Katsir, terutama dalam menafsirkan frasa "uli al-amr minkum." Perbedaan ini mencerminkan perbedaan landasan teologis dan sumber otoritas keagamaan antara mazhab Syiah dan Sunni.

Tabel berikut merangkum perbedaan inti antara kedua tafsir:

ASPEK KAJIAN	TAFSIR AL-QUMMI (SYIAH)	TAFSIR IBN KATSIR (SUNNI)
Fokus Penafsiran	Ulil al-amr sebagai inti ayat	Ulil al-amr sebagai komponen dalam struktur ketaatan
Makna uli al-amr	Dua belas imam ma'sum dari ahlulbait	Para pemimpin umat yang berpegang pada syariat, termasuk ulama, hakim, dan pemerintah.
Jenis ketaatan	Absolut, Setara dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul	Bersyarat: selama pemimpin tidak memerintahkan maksiat
Sumber Legitimasi Otoritas	Penetapan Ilahi melalui nash	Kemampuan menjaga dan menegakkan hukum Allah.
Model Kepemimpinan	Imamah menjadi pilar agama & Keilmuan berbasis garis keturunan Nabi	Kepemimpinan berbasis kompetensi, consensus dalam syariat

Hasil penelitian mengungkap bahwa Tafsir al-Qummi memusatkan seluruh makna ayat pada otoritas Imam ma'sum sebagai satu-satunya figur yang layak ditaati, sehingga uli al-amr dipahami secara eksklusif. Sebaliknya, Tafsir Ibn Katsir memahami uli al-amr secara luas dan kontekstual sebagai otoritas kepemimpinan yang muncul dari komunitas umat Islam selama tunduk pada syariat.

Dengan demikian, perbedaan penafsiran terhadap QS. An-Nisa' ayat 59 tidak hanya terjadi pada sisi linguistik, tetapi juga berakar pada paradigma teologis dan epistemologis yang berbeda antara Syiah dan Sunni dalam menetapkan sumber otoritas keagamaan.

Pembahasan

Allah SWT, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) [Q.S. An-Nisa: 59]

Dalam Tafsir Al-Qummi menjelaskan: Kemudian Allah mewajibkan kepada manusia untuk menaatinya (*ulil Amri*). Maka Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kalian, yakni *Amirul Mukminin* (pemimpin kaum mukmin). Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Hammad, dari Hariz, dari Abu Abdullah (Ja'far al-Shadiq) 'alaihi salam, ia berkata: Ayat berikut turun. "Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, Rasul, dan pemimpin di antara kalian." (Ibrahim, 1984)

Setelah menelaah penafsiran QS. an-Nisa': 59 dalam Tafsir al-Qummi, dapat dipahami bahwa perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul ditempatkan dalam kerangka otoritas keagamaan yang tidak terlepas dari posisi para Imam sebagai rujukan utama pengetahuan agama. Penafsiran al-Qummi terhadap frasa *uli al-amr* disampaikan melalui riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada para Imam, sehingga makna ayat dipahami melalui otoritas interpretatif mereka, meskipun tanpa pernyataan eksplisit bahwa *uli al-amr* merujuk secara langsung kepada Ahlul Bait (Amir-Moezzi, 2023b).

Dalam konteks epistemologi Syiah Imamiyah, penggunaan riwayat Imam sebagai sumber utama penafsiran menunjukkan bahwa kepemimpinan dan otoritas pengetahuan agama bersifat berkelanjutan melalui institusi Imamah (Dakake, 2023). Oleh karena itu, perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul ketika terjadi perselisihan tidak hanya dimaknai sebagai rujukan tekstual kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga sebagai rujukan epistemologis yang dimediasi oleh otoritas para Imam (Esack, 2023). Pola penafsiran ini menegaskan bahwa Tafsir al-Qummi merepresentasikan konstruksi otoritas keagamaan Syiah yang khas, di mana teks Al-Qur'an dipahami melalui jaringan transmisi pengetahuan yang berakar pada Imamah (Rizvi, 2024a).

Disisi lain, Ibnu Katsir berkata: Allah Ta'ala memerintahkan untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya, yaitu dengan mengikuti Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, serta menaati *uli al-amr* di antara kalian, yaitu para pemimpin (*umara'*) dan para ulama. Hal itu karena para

pemimpin memerintahkan manusia untuk menaati Allah, sedangkan para ulama memberikan fatwa kepada mereka tentang apa yang mengandung ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Telah datang banyak hadis yang memerintahkan ketaatan kepada para pemimpin selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Adapun firman-Nya, “Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul,” maksudnya adalah kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, karena keduanya terjaga dari kesesatan, dan siapa yang mengikutinya tidak akan tersesat (Kathir, 2000).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, frasa *uli al-amr* dipahami sebagai pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam urusan umat, baik dalam ranah keagamaan maupun politik. Ibnu Katsir mengemukakan bahwa *uli al-amr* mencakup para pemimpin (*al-umara'*) dan ulama, yaitu mereka yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan masyarakat serta memberikan bimbingan keagamaan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ketaatan kepada *uli al-amr* bersifat kondisional, yakni selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan dan tetap berada dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul (Saleh, 2024).

Ibnu Katsir menegaskan penafsirannya dengan merujuk kepada sejumlah hadis Nabi saw., di antaranya hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin meskipun ia tidak sempurna, selama tidak memerintahkan maksiat. Selain itu, ia mengutip pandangan para sahabat seperti Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah yang memahami *uli al-amr* sebagai pemimpin dan ahli ilmu. Dalam kerangka tafsir Sunni klasik, otoritas penafsiran dibangun melalui jaringan transmisi riwayat (*naql*) yang bersumber dari Nabi, sahabat, dan *tabi'in*, kemudian diperkuat oleh ijtihad ulama (Shah, 2024).

Penafsiran Ibnu Katsir menunjukkan bahwa dalam epistemologi tafsir Sunni klasik, otoritas keagamaan dan politik bersifat fungsional dan tidak dilekatkan pada individu tertentu secara ilahiah. Kepemimpinan dipahami sebagai kebutuhan sosial umat untuk menjaga ketertiban dan menegakkan syariat, bukan sebagai institusi teologis yang diwariskan. Oleh karena itu, ketika terjadi perselisihan, rujukan utama tetap dikembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan kepada *uli al-amr*. Hal ini menegaskan bahwa dalam tafsir Sunni, *uli al-amr* tidak memiliki otoritas epistemologis final, melainkan berada di bawah otoritas wahyu dan Sunnah Nabi (Saeed, 2023).

Dari penafsiran QS. an-Nisa': 59, terlihat bahwa epistemologi tafsir Sunni klasik, sebagaimana direpresentasikan oleh Ibnu Katsir, menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama pengetahuan agama, dengan sahabat sebagai otoritas transmisi awal dan ulama

sebagai pelaku ijtihad. Tafsir dibangun melalui kombinasi antara riwayat (atsar), pemahaman kontekstual, dan penalaran fikih. Model epistemologi ini menegaskan bahwa otoritas penafsiran bersifat kolektif dan historis, bukan personal atau genealogis, sehingga membedakannya secara mendasar dari konstruksi epistemologi Imamah dalam tradisi Syiah (Kathir, 2000).

Dalam tradisi Syiah Imamiyah, konsep uli al-amr dipahami sebagai otoritas ilahi yang ditetapkan melalui nash dan dilekatkan pada para Imam dari Ahl al-Bayt sebagai penerus otoritas kenabian (Amir-Moezzi, 2023a). Pemaknaan ini berangkat dari asumsi epistemologis bahwa pengetahuan keagamaan yang otoritatif bersumber dari figur yang ma'sum dan memiliki legitimasi transenden, sehingga ketaatan kepada uli al-amr merupakan bagian integral dari ketaatan kepada Allah dan Rasul (Rizvi, 2024b). Konsekuensinya, kepemimpinan dalam perspektif Syiah tidak sekadar bersifat administratif atau politik, melainkan memiliki dimensi teologis yang menentukan validitas ajaran dan praktik keagamaan umat (Daftary, 2023). Dengan demikian, tafsir terhadap QS. an-Nisa': 59 menjadi dasar normatif bagi konstruksi kepemimpinan yang bersifat absolut dan hierarkis dalam kerangka teologi Syiah.

Sebaliknya, dalam tradisi Sunni, uli al-amr dipahami sebagai otoritas fungsional yang mencakup penguasa politik, ulama, atau pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam mengelola urusan umat (Brown, 2024). Pemaknaan ini didasarkan pada epistemologi tafsir yang menekankan otoritas kolektif, ijtihad, dan kemaslahatan sebagai dasar legitimasi kepemimpinan (Al-Raysuni, 2023). Dalam kerangka ini, ketaatan kepada uli al-amr bersifat kondisional, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Pandangan tersebut melahirkan konsep kepemimpinan umat yang lebih fleksibel dan kontekstual, di mana otoritas keagamaan dan politik dapat dibedakan namun tetap saling beririsan. Implikasi sosial-teologisnya adalah terbentuknya model kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan legitimasi normatif dari teks Al-Qur'an (Fauzi, 2025).

Pendekatan hermeneutik dalam penelitian ini merujuk pada hermeneutika filosofis yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer, yang memandang pemahaman sebagai hasil dialog antara teks, tradisi, dan pembaca, bukan sebagai proses penemuan makna objektif yang berdiri di luar konteks sejarah. Dalam kerangka ini, QS. an-Nisa': 59 diposisikan sebagai teks normatif yang memiliki keterbukaan makna, sehingga memungkinkan lahirnya beragam penafsiran sesuai dengan horizon historis dan teologis penafsirnya. Konsep uli al-amr dalam ayat tersebut

tidak dijelaskan secara eksplisit oleh teks, sehingga membuka ruang interpretasi yang kemudian diisi oleh tradisi tafsir yang berbeda (Gadamer, 2013).

Dalam Tafsir al-Qummi, pemahaman terhadap uli al-amr dibangun atas dasar epistemologi Imamah Syiah, yang menempatkan para Imam Ahl al-Bayt sebagai otoritas ilahiah yang ma'sum. Penafsiran ini tidak dapat dilepaskan dari pra-pemahaman (Vorverständnis) teologis Syiah mengenai kepemimpinan umat sebagai institusi transenden yang ditetapkan melalui nash. Sebaliknya, tafsir Sunni—seperti al-Tabari dan Ibn Kathir—memahami uli al-amr secara fungsional sebagai pemegang otoritas sosial dan keagamaan, baik dalam bentuk umara' maupun ulama'. Perbedaan ini menunjukkan bahwa makna ayat tidak semata-mata ditentukan oleh teks, melainkan juga oleh horizon tradisi tafsir yang melingkupinya (Ibrahim, 1984).

Melalui perspektif Gadamer tentang fusion of horizons (Horizontverschmelzung), perbedaan penafsiran Sunni–Syiah tidak dipahami secara konfrontatif, melainkan sebagai dialog antarhorizon yang sama-sama berupaya memahami teks wahyu. Titik temu kedua tradisi terletak pada pengakuan akan pentingnya otoritas dalam menjaga keteraturan umat, sementara perbedaannya berkisar pada sumber dan sifat otoritas tersebut. Dengan demikian, pembacaan hermeneutik dialogis memungkinkan QS. an-Nisa': 59 dipahami sebagai ruang perjumpaan makna antara wahyu, sejarah penafsiran, dan kebutuhan pembaca kontemporer, tanpa harus mereduksi kompleksitas teologis yang ada. Hermeneutika dalam konteks ini tidak diceramahkan sebagai teori, tetapi dipraktikkan sebagai metode pemahaman yang reflektif dan inklusif (Syamsuddin, 2023b).

Pendekatan hermeneutik dialogis yang digunakan dalam kajian ini memiliki sejumlah kekuatan metodologis yang signifikan. Dengan merujuk pada hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer, metode ini memungkinkan pemahaman QS. an-Nisa': 59 sebagai teks yang hidup dan terbuka, yang maknanya lahir melalui dialog antara horizon teks, tradisi tafsir, dan pembaca kontemporer. Kekuatan utama pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk menghindari klaim kebenaran tunggal, serta membuka ruang apresiasi terhadap keragaman penafsiran Sunni dan Syiah sebagai produk dari pra-pemahaman teologis yang berbeda. Dalam konteks kajian Imamah, hermeneutika dialogis membantu memetakan perbedaan epistemologis tanpa mereduksinya menjadi konflik doktrinal, sehingga analisis tafsir dapat dilakukan secara reflektif dan non-konfrontatif (Gadamer, 2013).

Namun demikian, pendekatan hermeneutik dialogis juga memiliki keterbatasan ketika diterapkan dalam kajian tafsir normatif. Hermeneutika Gadamer tidak dimaksudkan untuk menetapkan kebenaran teologis final, melainkan untuk memahami proses terjadinya makna. Oleh karena itu, metode ini kurang memadai apabila digunakan untuk menjawab pertanyaan normatif seperti “penafsiran mana yang paling benar secara akidah.” Dalam konteks tafsir yang berorientasi pada penetapan hukum atau legitimasi doktrin, hermeneutika dialogis berisiko dianggap relativistik karena menempatkan seluruh penafsiran dalam posisi dialogis yang setara. Keterbatasan ini menuntut kehati-hatian agar hermeneutika tidak menggantikan metodologi tafsir klasik, melainkan berfungsi sebagai pendekatan pelengkap dalam analisis makna dan epistemologi penafsiran (Saeed, 2006).

Meskipun memiliki keterbatasan, pendekatan hermeneutik dialogis tetap relevan dan strategis bagi studi tafsir lintas mazhab. Dalam konteks akademik kontemporer, khususnya kajian Sunni–Syiah, metode ini berperan sebagai jembatan metodologis yang memungkinkan dialog ilmiah tanpa mengaburkan identitas teologis masing-masing tradisi. Hermeneutika dialogis membantu memindahkan perdebatan tafsir dari ranah polemik menuju ranah pemahaman epistemologis, sehingga perbedaan dapat dipahami sebagai kekayaan intelektual Islam. Dengan demikian, pendekatan ini menunjukkan kedewasaan metodologis (*methodological maturity*) dalam studi Al-Qur’an, terutama ketika tujuan penelitian adalah pemetaan makna, bukan penyeragaman keyakinan (Amir-Moezzi, 2023a).

Kajian ini memberikan implikasi epistemologis yang signifikan bagi studi tafsir kontemporer, khususnya dalam memahami Al-Qur’an sebagai teks yang terus berdialog dengan konteks sejarah dan pembacanya. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dialogis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan paradigma tafsir yang tidak semata-mata berorientasi pada penetapan makna normatif, tetapi juga pada pemetaan cara pengetahuan tafsir dibangun dalam tradisi yang berbeda. Pendekatan ini menegaskan bahwa perbedaan penafsiran—seperti dalam pemaknaan *uli al-amr* antara tafsir Sunni dan Syiah—merupakan konsekuensi epistemologis dari perbedaan pra-pemahaman teologis dan horizon historis, bukan semata bentuk penyimpangan metodologis. Dengan demikian, studi ini memperkaya wacana tafsir dengan menempatkan pluralitas penafsiran sebagai objek kajian ilmiah yang sah dan produktif (Syamsuddin, 2023a).

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa hermeneutika dialogis dapat berfungsi sebagai kerangka epistemologis yang menjembatani kajian tafsir lintas mazhab di ruang

akademik Indonesia. Dalam konteks keilmuan kontemporer, pendekatan ini relevan untuk menggeser orientasi kajian tafsir dari polemik kebenaran menuju analisis metodologis dan historis atas proses penafsiran. Hal ini sejalan dengan perkembangan studi Al-Qur'an di Indonesia yang semakin menekankan pendekatan interdisipliner dan dialogis, tanpa harus menghilangkan otoritas metodologi tafsir klasik. Hermeneutika, dalam hal ini, diposisikan sebagai pendekatan reflektif yang melengkapi bukan menggantikan ilmu tafsir normatif (Mustaqim, 2023).

Adapun arah kajian tafsir komparatif ke depan perlu diarahkan pada pengembangan studi lintas mazhab yang lebih sistematis, dengan memperhatikan dimensi epistemologi, metodologi, dan konteks sosial penafsir. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian tidak hanya pada perbedaan makna ayat, tetapi juga pada konstruksi otoritas penafsiran dan relasinya dengan dinamika sosial umat. Dengan pendekatan semacam ini, kajian tafsir komparatif diharapkan mampu berkontribusi pada penguatan tradisi keilmuan Islam yang inklusif, kritis, dan dialogis, sekaligus relevan dengan tantangan keberagaman di masyarakat plural. Bagian ini menjadi penutup pembahasan yang menegaskan kedewasaan metodologis sebelum penelitian ditarik pada kesimpulan akhir (Syamsuddin, 2023b)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hermeneutik atas QS. an-Nisa': 59, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penafsiran antara Tafsir al-Qummi (Syiah) dan tafsir Sunni tidak semata-mata bersumber dari perbedaan linguistik ayat, melainkan dari epistemologi keagamaan yang melatarbelakangi penafsir. Dalam Tafsir al-Qummi, konsep uli al-amr dipahami dalam kerangka epistemologi imamah, yakni otoritas kepemimpinan yang bersifat teologis, sakral, dan terikat pada figur Imam ma'sum. Sementara itu, tafsir Sunni memaknai uli al-amr sebagai otoritas fungsional umat baik ulama maupun umara yang bersifat kontekstual dan historis.

Melalui pendekatan hermeneutik dialogis, khususnya dalam kerangka fusi horizon (Horizontverschmelzung), tampak bahwa teks QS. an-Nisa': 59 tidak berdiri sebagai makna tunggal yang ahistoris, melainkan senantiasa dipahami melalui dialog antara horizon teks, horizon penafsir, dan horizon pembaca kontemporer. Dengan demikian, makna ayat tidak diposisikan sebagai kebenaran final yang tertutup, tetapi sebagai medan dialog yang memungkinkan keberagaman pemahaman tanpa harus jatuh pada sikap konfrontatif antar mazhab.

Pendekatan hermeneutik dalam kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan tafsir Sunni–Syiah bukanlah bentuk penyimpangan teks, melainkan refleksi dari kerangka epistemologis dan historis yang berbeda. Oleh karena itu, hermeneutika berfungsi tidak hanya sebagai alat analisis metodologis, tetapi juga sebagai jembatan pemahaman lintas mazhab yang menekankan sikap reflektif, kritis, dan inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa studi tafsir kontemporer perlu bergerak melampaui klaim kebenaran normatif semata menuju dialog ilmiah yang menghargai pluralitas penafsiran dalam tradisi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qummi, A. ibn I. (1984). *Tafsir al-Qummi*. Mu'assasah al-Imam al-Mahdi.
- Al-Raysuni, A. (2023). Maslahah and Authority in Sunni Legal Theory. *Islamic Law and Society*, 30(1), 45–68.
- Amir-Moezzi, M. A. (2023a). Authority and the Imam in Twelver Shi'ism revisited. *Journal of Shi'a Islamic Studies*, 16(1–2), 7–34.
- Amir-Moezzi, M. A. (2023b). Authority, Plurality, and Interpretation in Sunni and Shi'i Traditions. *Journal of Shi'a Islamic Studies*, 16(2), 145–162.
- Brown, J. A. C. (2024). Sunni conceptions of political and religious authority. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 1–18.
- Chandra, H., Alwi, Z., Rahman, R., Ghozali, I., & Irwanto, M. (2021). *Pengaruh Politik Sunni dan Syiah terhadap Perkembangan Ilmu Hadis*. Rajawali Pers.
- Daftary, F. (2023). *The Shi'i Imamate: Doctrine and History*. I.B. Tauris.
- Dakake, M. M. (2023). *The Charismatic Community: Shi'ite Identity and Authority Reconsidered*. Edinburgh University Press.
- Esack, F. (2023). Authority, Interpretation, and Qur'anic Meaning. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 1–15.
- Fadel, M. (2020). Authority and obedience in Islamic political thought. *Journal of Islamic Ethics*, 4(1–2), 241–252.
- Fauzi, A. (2025). Ulil Amri dan Kepemimpinan dalam Tafsir Sunni Kontemporer. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 21(1), 88–105.
- Gadamer, H.-G. (2013). *Truth and Method*. Bloomsbury.
- Syaikhu. (2019). Imamah dalam Pemikiran Politik Syi'ah. *Asy-Syari'ah*, 5(1), 35–52.
- Kathir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar al-Hadith.

- Mustaqim, A. (2023). Hermeneutika Al-Qur'an dan Tantangan Tafsir Normatif Kontemporer. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 24(2), 265–284.
- Rizvi, S. (2024a). Imamate, Knowledge, and Qur'anic Interpretation in Early Shi'i Thought. *Islamic Studies*, 63(2), 211–230.
- Rizvi, S. (2024b). Shi'i epistemology and the question of religious authority. *Islamic Studies Review*, 3(1), 58–73.
- Rusli, R. (2015). Imamah: Kajian Doktrin Syi'ah dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik. *Intizar*, 21(2), 231–252.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Saeed, A. (2023). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (2nd ed.). Routledge.
- Saleh, W. A. (2024). Authority and Obedience in Sunni Qur'anic Exegesis. *Journal of Qur'anic Studies*, 26(1), 89–108.
- Shah, M. (2024). Hadith, Authority, and Interpretation in Classical Sunni Tafsir. *Islamic Law and Society*, 31(2), 173–195.
- Syamsuddin, S. (2023a). Hermeneutika Filosofis dan Pengembangan Studi Al-Qur'an Kontemporer di Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(1), 1–32.
- Syamsuddin, S. (2023b). Tafsir Lintas Mazhab dan Etika Dialog Keilmuan. *Islamica: Journal of Islamic Studies*, 17(1), 45–68.
- Zulkarnain. (2011). Konsep Al-Imamah dalam Perspektif Syiah. *Jurnal Tapis*, 7(13), 64–79.